

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sewa (*lease*) didefinisikan dalam PSAK 30 (revisi 2007) sebagai: suatu perjanjian dimana *lessor* memberikan hak kepada *lessee* untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati dan sebagai imbalannya, *lessee* melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada *lessor*. *Lease* saat ini makin marak dipilih sebagai alternatif pembiayaan bagi berbagai perusahaan. Di Indonesia sendiri, kehadiran industri leasing dimulai tahun 1994 setelah dikeluarkannya SKB Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian & Perdagangan no.122/MK/IV/2/1974 dan No. 30/Kpb/I/1974 tgl 7 Februari 1974 tentang Perijinan Usaha Leasing. Alasan makin maraknya perusahaan yang memilih leasing sebagai alternatif pendanaan karena leasing dirasa lebih luwes atau fleksibel dalam struktur kontraknya dibanding meminjam pada bank, mengatasi kekhawatiran terhadap keusangan dan berbagai keuntungan lainnya yang akan dijelaskan lebih lanjut di bab II.

Pada kenyataannya, perusahaan (dari sisi *lessee*) seringkali memperlakukan *lease* yang seharusnya *finance lease* sebagai *operating lease* sebagai sarana melakukan *off-balance sheet financing*, yaitu tak tercatatnya kewajiban pendanaan tertentu (Subramanyam, 2010:216). Padahal jika dalam leasing tersebut terdapat perpindahan manfaat dan risiko yang substansial dari *lessor* kepada *lessee*,

asset dan kewajiban seharusnya dicatat dan leasing diperlakukan seperti pembelian cicilan (*finance lease*). Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa perusahaan tak dapat menghindari pencatatan utang dengan melakukan leasing, dibutuhkan suatu standar akuntansi yang mengatur tentang hal ini sehingga menjamin tersedianya informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Di Indonesia, akuntansi untuk *lease* diatur dalam PSAK 30 (revisi 2007) yang diadopsi dari IFRS (IAS 17). Standar ini dibuat untuk mendukung tujuan pelaporan keuangan, yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (PSAK 1999:3).

Di sini penulis mengangkat kasus leasing pada PT Supra Aspindo Jaya (sebagai *lessee*). Pembahasan difokuskan pada kasus leasing dari sisi *lessee* dan pembahasan dari sisi *lessor* disertakan sebagai tambahan. Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Sofhyan (1996) yang menganalisa mengenai alternatif leasing dengan alternatif pinjaman dari bank untuk pengambilan keputusan pembiayaan aktiva tetap pada perusahaan tersebut. Selain itu, analisa kasus leasing pada PT Supra Aspindo Jaya juga pernah dilakukan oleh Silvie Djiono (2001) yang membandingkan antara penerapan akuntansi yang selama ini dipakai perusahaan dengan penerapan akuntansi yang tepat terhadap kasus leasing menurut PSAK 30 sehingga terlihat perbedaannya pada laporan keuangan perusahaan.

Meskipun penelitian serupa telah dilakukan oleh beberapa peneliti lain yang disebutkan sebelumnya, namun disini penulis lebih memfokuskan pada penyajian kasus nyata dan komprehensif tentang lease berdasarkan lingkungan bisnis di Indonesia, yang membuat pembaca memahami bagaimana penerapan akuntansi

yang tepat terhadap kasus leasing berdasar PSAK 30 (revisi 2007) adopsi IFRS dan teori-teori akuntansi yang mendasari diterapkannya praktek tersebut berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan. Penelitian ini menggunakan standar yang terbaru saat penelitian ini disusun dimana dalam PSAK 30 (revisi 2007) telah terdapat adopsi dari IFRS, sementara penelitian-penelitian sebelumnya yang disusun sebelum ada revisi PSAK 30 masih menggunakan standar yang lama dimana belum terdapat adopsi dari IFRS. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat lebih relevan dan bermanfaat bagi pembaca.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang penelitian tersebut, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

Bagaimana penerapan PSAK 30 (revisi 2007) adopsi IFRS (IAS 17 tahun 2009) tentang *lease* berdasarkan lingkungan bisnis di Indonesia serta penjelasan penalaran teori yang mendasarinya berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana penerapan PSAK 30 (revisi 2007) adopsi IFRS (IAS 17 tahun 2009) tentang *lease* berdasarkan lingkungan bisnis di Indonesia dengan menggunakan studi kasus pada PT. Supra Aspindo Jaya, serta menjelaskan penalaran teori yang mendasarinya berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Membuat pembaca mengetahui bagaimana penerapan PSAK 30 (revisi 2007) yang diadopsi dari IFRS (IAS 17 tahun 2009) terkait perjanjian sewa pada lingkungan bisnis di Indonesia.
- b. Memperluas pemahaman pembaca penelitian mengenai teori-teori akuntansi yang mendasari diterapkannya akuntansi untuk *lease*.
- c. Memberi masukan pada perusahaan bagaimana penerapan akuntansi yang tepat dalam menghadapi kasus *lease*.